

Ahimsa sebagai Kewarganegaraan Kontestatif: Institusionalisasi dan Protest di Asia Selatan

Guntur Arie Wibowo

¹Universitas Samudra, Langsa, Indonesia

guntur.fkip@unsam.ac.id

Abstrak

This article examines how Ahimsa was institutionalized as a discourse of nonviolent citizenship in India and how this repertoire resonates in recent South Asian protest movements. Using qualitative document analysis and directed content analysis, the study analyzes Gandhian interpretations of Ahimsa and Satyagraha, Indian education policy documents, curriculum frameworks, and recent scholarly studies on civic resistance. The analysis traces three linked processes: moral translation, institutional transmission, and civic enactment. The findings show that Gandhi recast Ahimsa from a religious ethic into an active political repertoire through Satyagraha. Postcolonial institutions, especially education policy, then preserved Ahimsa as a normative language of citizenship. Recent protests in India, especially the farmers' movement and Shaheen Bagh, continued to use nonviolent repertoires while adapting them to gendered leadership, constitutional claim-making, and digital circulation. Comparative evidence from Bangladesh and Nepal further shows that youth-led civic resistance now relies heavily on networked communication, even when its moral language is not explicitly Gandhian. The article concludes that Ahimsa now operates less as a fixed personal trait than as a contested public language of nonviolent citizenship, strongest institutionally in India and echoed selectively elsewhere in South Asia.

Keyword

Ahimsa; nonviolent citizenship; political socialization; India; Satyagraha

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Abstrak

Artikel ini mengkaji bagaimana Ahimsa diinstitusionalisasikan sebagai wacana kewarganegaraan non-kekerasan di India serta bagaimana repertoar tersebut bergaung dalam gerakan protes terkini di Asia Selatan. Dengan menggunakan analisis dokumen kualitatif dan analisis konten terarah, penelitian ini menganalisis interpretasi Gandhian terhadap Ahimsa dan Satyagraha, dokumen kebijakan pendidikan India, kerangka kurikulum, serta studi ilmiah terkini tentang perlawanan sipil. Analisis tersebut menelusuri tiga proses yang saling terkait: penerjemahan moral, transmisi institusional, dan pengamalan kewargaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Gandhi mentransformasi Ahimsa dari etika religius menjadi repertoar politik aktif melalui Satyagraha. Institusi pascakolonial, khususnya kebijakan pendidikan, kemudian mempertahankan Ahimsa sebagai bahasa normatif kewarganegaraan. Protes-protes terkini di India, khususnya gerakan petani dan Shaheen Bagh, terus memanfaatkan repertoar non-kekerasan sambil menyesuainya dengan kepemimpinan berperspektif gender, pembuatan klaim konstitusional, dan sirkulasi digital. Bukti komparatif dari Bangladesh dan Nepal lebih lanjut menunjukkan bahwa perlawanan sipil yang dipimpin pemuda kini sangat bergantung pada komunikasi berjejaring, meskipun

bahasa moralnya tidak secara eksplisit bersifat Gandhian. Artikel ini menyimpulkan bahwa Ahimsa kini beroperasi bukan lagi sebagai sifat pribadi yang tetap, melainkan sebagai bahasa publik yang diperebutkan mengenai kewarganegaraan non-kekerasan yang paling kuat secara institusional di India dan bergaung secara selektif di tempat lain di Asia Selatan.

Keywords Ahimsa; kewarganegaraan tanpa kekerasan; sosialisasi politik; India; Satyagraha

A. Pendahuluan

Sosiologi politik Asia Selatan sangat dibentuk oleh tradisi perlawanan antikolonial. Dalam konteks India, Mahatma Gandhi mentransformasi Ahimsa yang telah lama berakar dalam tradisi etika Hindu, Buddha, dan Jain menjadi metode politik yang kuat melalui praktik Satyagraha. Studi terkini menggambarkan Satyagraha sebagai budaya politik yang mengintegrasikan kebenaran, non-kekerasan, dialog, dan kasih sosial, bukan sekadar sebagai pembatasan taktis semata. Transformasi ini penting karena menjadikan non-kekerasan tidak hanya sebagai kebajikan spiritual pribadi, melainkan juga sebagai repertoar publik aksi kewargaan (Diop et al., 2020; Gianolla, 2025; Stephan et al., 2008).

Penelitian tentang perlawanan non-kekerasan menunjukkan bahwa keberhasilan non-kekerasan tidak hanya berasal dari gangguan strategis, tetapi juga dari disiplin moral, visibilitas simbolik, serta pembentukan identitas kolektif. Pendekatan Gandhi bersifat khas karena ia memperlakukan non-kekerasan bukan sebagai ketiadaan kekuatan, melainkan sebagai disiplin aktif berbasis kebenaran yang menyelaraskan sarana dan tujuan. Kajian mikro-sosiologi terkini semakin memperkuat bahwa perlawanan non-kekerasan memperoleh kekuatannya melalui irama aksi, koordinasi tubuh, umpan balik emosional, serta pengelolaan represi. Hal ini membantu menjelaskan mengapa tindakan penolakan yang berulang dapat membentuk subjektivitas politik yang langgeng (Bramsen, 2023; Gianolla, 2025; Stephan et al., 2008).

Meskipun studi-studi yang ada telah banyak menjelaskan pemikiran Gandhi serta efektivitas strategis perlawanan sipil, masih relatif sedikit penelitian yang membahas bagaimana Ahimsa dilestarikan dan diteruskan pasca-kemerdekaan melalui institusi-institusi yang membentuk kewarganegaraan. Celah penelitian ini penting, sebab protes-protes kontemporer di Asia Selatan tidak hanya mencerminkan pilihan taktis, tetapi juga hasil dari proses sosialisasi jangka panjang melalui pendidikan, wacana publik, dan praktik kewarganegaraan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana Ahimsa diterjemahkan dari sebuah etika religius menjadi wacana kewarganegaraan non-kekerasan di India, serta bagaimana repertoar tersebut bergaung dalam gerakan protes terkini di kawasan Asia Selatan.

Untuk menjelaskan pergeseran Ahimsa dari etika religius menjadi bagian integral kewarganegaraan, penelitian ini mengintegrasikan teori institusionalisasi dan sosialisasi

politik. Kerangka teori Berger & Luckman (1966) membantu memahami bagaimana nilai-nilai menjadi terlembagakan dan stabil melalui proses legitimasi serta praktik rutin. Di sisi lain, literatur sosialisasi politik menunjukkan bagaimana warga negara membentuk orientasi politik yang relatif stabil melalui berbagai agen sosialisasi, seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, media, dan lingkungan politik secara keseluruhan. Dalam artikel ini, fokus empiris utama diletakkan pada wacana sekolah dan negara sebagai bukti dokumenter terkuat, sementara peran keluarga diperlakukan sebagai konteks sosialisasi moral dini yang penting, bukan sebagai temuan empiris primer (Neundorf & Smets, 2017).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis dokumen kualitatif dengan strategi analisis konten terarah. Pendekatan analisis dokumen dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji bagaimana institusi merepresentasikan, mengkodifikasikan, dan melegitimasi nilai-nilai melalui teks kebijakan, kerangka kurikulum, serta kajian ilmiah terkait gerakan sosial. Strategi analisis konten terarah juga sesuai karena proses pengkodean dimulai dari kerangka teori yang jelas, yaitu bagaimana nilai-nilai diterjemahkan, ditransmisikan, dan diamankan. Korpus data mencakup empat kelompok teks: interpretasi Gandhian tentang Ahimsa dan Satyagraha, dokumen resmi pendidikan di India, studi *peer-reviewed* mengenai perlawanan non-kekerasan dan sosialisasi politik, serta kajian terkini tentang gerakan protes di India, Bangladesh, dan Nepal. Dokumen-dokumen tersebut dipilih berdasarkan relevansi, otoritas institusional, dan kecocokan analitis. Proses pengkodean menggunakan tiga kategori utama: penerjemahan moral, transmisi institusional, dan pengamalan kewargaan. Karena bukti yang digunakan bersifat dokumenter, artikel ini tidak mengklaim adanya pengamatan langsung terhadap internalisasi nilai oleh individu. Sebaliknya, penelitian ini menjelaskan konstruksi institusional dan artikulasi publik mengenai kewarganegaraan non-kekerasan (Bowen, 2009; Hsieh & Shannon, 2005).

C. Hasil Pembahasan

Dari Prinsip Etika Menjadi Repertoar Politik

Temuan pertama menunjukkan bahwa Gandhi mentransformasi Ahimsa dari etika religius menjadi repertoar aktif perlawanan kewargaan. Dalam rumusan Gandhian, Ahimsa tidak berarti pasif. Ahimsa dihubungkan dengan Satya (kebenaran) dan dioperasionalkan melalui Satyagraha, yang menekankan tekanan moral, persuasi publik, serta penolakan yang disiplin. Penerjemahan moral ini memungkinkan non-kekerasan berpindah dari ranah kebajikan pribadi ke ranah politik massa. Dari perspektif sosiologis, Gandhi mengubah sebuah nilai menjadi bentuk politik yang dapat direproduksi. Bentuk ini penting karena memberi aksi antikolonial sebuah bahasa publik yang kemudian dapat dilestarikan dan ditafsirkan ulang oleh institusi-institusi pascakolonial (Diop et al., 2020; Gianolla, 2025).

Inovasi Gandhi adalah memperluas prinsip ini ke ranah politik sambil mempertahankan inti spiritualnya. Ia mengkonseptualisasikan ulang Ahimsa sebagai “kekuatan aktif” dan bukan sekadar non-perlawanan pasif, dengan menegaskan bahwa “seseorang tidak dapat bersikap non-kekerasan secara pasif” (Malik et al., 2011). Gandhi mengaitkan Ahimsa dengan Satya, sehingga menciptakan Satyagraha sebagai metode perlawanan non-kekerasan yang mengutamakan “cinta dan emosi relasional daripada kekuatan serta alasan yang sepihak atau semata-mata prinsipil” (Gianolla, 2025). Gandhi menginstitutionalisasi nilai-nilai ini melalui sistem Ashram, yaitu komunitas-komunitas di mana kehidupan non-kekerasan dipraktikkan sebagai cara hidup yang utuh. Dimensi performatif dari transformasi ini sangat penting yakni protes non-kekerasan bukan hanya ketiadaan kekerasan, melainkan “performativitas penarikan diri dan ketidakpatuhan” (Bramsen, 2023). Tindakan penolakan, baik melalui puasa, non-kooperasi, maupun ketidakpatuhan sipil merupakan “penciptaan performatif secara bertahap terhadap subjek perlawanan”.

Keberhasilan gerakan kemerdekaan India memicu apa yang disebut para peneliti sebagai “keyakinan” terhadap aksi non-kekerasan di seluruh Asia Selatan. Hal ini menginspirasi gerakan-gerakan berikutnya, termasuk Gerakan Bahasa 1952 di Bangladesh, Gerakan Rakyat di Nepal, serta berbagai perjuangan hak sipil. Trajektori sejarah ini menunjukkan bahwa Ahimsa berkembang bukan sekadar sebagai konsep filosofis, melainkan sebagai “repertoar perlawanan”, seperangkat praktik mapan yang dapat dimanfaatkan dan diadaptasi oleh gerakan-gerakan selanjutnya (Tilly, 1978).

Pendidikan dan Kurikulum sebagai Mekanisme Transmisi

Temuan kedua adalah bahwa India pascakolonial paling jelas melestarikan Ahimsa melalui pendidikan formal. Kebijakan Pendidikan Nasional 2020 menyatakan bahwa kurikulum harus mencakup nilai-nilai tradisional India dan nilai-nilai konstitusional, seperti *seva*, *ahimsa*, *satya*, *nishkam karma*, dan *shanti*. Kebijakan yang sama juga mewajibkan kurikulum dan pedagogi berakar pada konteks India dan lokal, serta menghubungkan pendidikan holistik dengan pengabdian masyarakat, nilai kewarganegaraan, dan pendidikan kewargaan global. Panduan Kementerian Pendidikan lebih lanjut menyebutkan bahwa bahan ajar NCERT mengintegrasikan nilai-nilai berorientasi perdamaian dan pendekatan partisipatif dalam pengajaran ilmu sosial. Kerangka Kurikulum Nasional untuk Pendidikan Sekolah 2023 melanjutkan arah ini dengan menempatkan pendidikan sekolah dalam visi sosial yang adil, inklusif, dan plural. Secara bersama-sama, dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa Ahimsa bertahan bukan sebagai keyakinan pribadi, melainkan sebagai nilai kewargaan formal yang direproduksi melalui kurikulum, pedagogi, dan wacana pendidikan yang disponsori negara (Diop et al., 2020; Guru, 2020; Ministry of Education, 2021; The National Steering Committee, 2023).

Kebijakan Pendidikan Nasional 2020 secara eksplisit mengintegrasikan Ahimsa ke dalam kurikulum nasional bersama nilai-nilai konstitusional dan kemanusiaan lainnya. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa seluruh kurikulum dan pedagogi harus “sangat

berakar pada konteks dan etos India serta lokal dalam hal budaya, tradisi, warisan, adat istiadat, bahasa, filsafat... agar pendidikan menjadi sebanyak mungkin relevan, bermakna, menarik, dan efektif bagi siswa kita” (Ministry of Education, 2021). Integrasi ini mencerminkan apa yang disebut para peneliti sebagai *Indian Knowledge System* (IKS), yang “menekankan perkembangan harmonis dimensi intelektual, moral, emosional, dan spiritual peserta didik” (Mahajan, 2026). IKS menempatkan pendidikan sebagai sarana “pembentukan karakter dan harmoni sosial, bukan sekadar akuisisi informasi atau keterampilan vokasional”, dengan mengambil dasar konsep Dharma (perilaku benar), Karma (tindakan etis), dan Ahimsa (Kumari, 2026).

Namun, efektivitas sosialisasi formal ini sangat bergantung pada metode pedagogi. NEP 2020 menekankan pergeseran dari pembelajaran hafalan menuju “kegiatan berbasis pengalaman dan nilai, seperti kerja sama tim, pengabdian masyarakat, dan proyek” (Mahajan, 2026). Perubahan ini menyadari bahwa internalisasi nilai memerlukan keterlibatan aktif, bukan penerimaan pasif. Kebijakan tersebut juga menyoroti pengembangan “kapasitas dan disposisi sosial, etis, dan emosional” di samping kemampuan kognitif (Mahajan, 2026).

Pengamalan Kewarganegaraan dalam Protes Kontemporer di India

Temuan ketiga menunjukkan bahwa protes-protes kontemporer di India terus memanfaatkan repertoar publik non-kekerasan ini, meskipun gerakan-gerakan tersebut bersifat heterogen dalam ideologi dan organisasi. Analisis Behl terhadap protes petani menunjukkan bahwa gerakan tersebut menawarkan visi demokrasi yang inklusif dan egaliter serta meminta pertanggungjawaban negara melalui perbedaan pendapat yang terorganisir (Behl, 2022). Demikian pula, kajian terkini tentang Shaheen Bagh mengungkapkan bahwa aktivisme perempuan Muslim berhasil menciptakan jaringan solidaritas diferensial dan mengkonfigurasi ulang batas-batas partisipasi politik di India. Kasus-kasus ini tidak sekadar mengulang Gandhi secara mekanis. Mereka menafsirkan ulang kewarganegaraan non-kekerasan melalui bahasa konstitusional, kepemimpinan berperspektif gender, pendudukan ruang publik, serta visibilitas yang dimediasi. Namun, kesinambungan dengan repertoar Gandhian tetap terlihat jelas dalam penggunaan protes yang disiplin, penderitaan publik, dan pembuatan klaim moral (Ali, 2024; Behl, 2022).

Protes Shaheen Bagh (2019-2020) di India, yang dipimpin terutama oleh perempuan Muslim, secara eksplisit mengadopsi metode ketidakpatuhan sipil Gandhian. Para demonstran “menahan dinginnya siang dan malam... bertahan selama empat bulan” dalam blokade jalan yang damai, sambil membacakan Pembukaan Konstitusi dengan lantang dan menyelenggarakan dapur komunitas (Bhagwat, 2020). Gerakan ini menunjukkan apa yang disebut dalam literatur sebagai “sebab sejati gerakan, sifat damainya, serta warisan keadilan tertinggi dari aksi non-kekerasan” yang menjadi “inti daya tarik bagi penyelenggara dan demonstran untuk menghindari jalur kekerasan” (Bhattacharai, 2025).

Dimensi gender dalam protes-protes ini sangat signifikan. Gerakan Shaheen Bagh menonjol karena dipimpin oleh “perempuan yang sebelumnya tidak pernah terlihat di

panggung politik... pada dasarnya ibu rumah tangga yang keluar dari perlindungan rumah mereka” (Bhagwat, 2020). Perempuan-perempuan ini “berkumpul secara spontan” tanpa kepemimpinan partai politik atau pendanaan LSM, sehingga membuktikan bahwa nilai-nilai Ahimsa mampu memobilisasi kelompok yang selama ini tersisih dari politik formal (Bhagwat, 2020). Pola gender ini menantang pandangan sosiologis konvensional yang cenderung menempatkan sosialisasi politik terutama di ruang publik yang didominasi laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi Ahimsa juga terjadi melalui praktik domestik dan berbasis komunitas yang sering kali tidak terlihat dalam analisis politik standar.

Protes petani di India (2020-2021) juga menggunakan metode non-kekerasan, antara lain duduk aksi, pawai, dan non-kooperasi ekonomi. Hal ini membuktikan kelangsungan taktik-taktik tersebut dalam mobilisasi massa kontemporer (Bhattarai, 2025). Namun, gerakan-gerakan ini tetap menghadapi kekerasan negara: “para petani demonstran diserang dengan tongkat bambu dan gas air mata oleh pasukan pemerintah, menyebabkan setidaknya satu kematian yang terkonfirmasi” (Bhattarai, 2025). Situasi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai “paradoks sosialisasi”: warga negara disosialisasikan ke dalam norma non-kekerasan, sementara negara sendiri melanggar norma tersebut dalam merespons perbedaan pendapat sipil.

Bukti Komparatif dari Bangladesh dan Nepal

Bukti komparatif dari Bangladesh dan Nepal menunjukkan adanya kesinambungan sekaligus perubahan dalam cara perlawanan sipil non-kekerasan diorganisasi dan dialami di seluruh Asia Selatan.

Pemberontakan Juli 2024 di Bangladesh bermula sebagai protes terhadap sistem kuota pegawai negeri dan kemudian berkembang menjadi gerakan anti-pemerintah nasional. Studi terkini menunjukkan bahwa media digital memainkan peran sentral dalam koordinasi, amplifikasi, dan pembentukan opini (Hushen, 2025). Penelitian mengindikasikan bahwa para demonstran (Gen Z) membentuk halaman dan grup Facebook bernama “Baishammo Virudhi Chhatra Andolan” (Gerakan Mahasiswa Anti-Diskriminasi) untuk mengorganisir protes, rapat umum, berbagi aktivitas gerakan, serta menyebarkan video, foto, dan berita terkait demonstrasi (Hushen, 2025). Titik balik gerakan terjadi ketika pasukan yang didukung pemerintah menyerang mahasiswa khususnya peserta perempuan dan polisi melepaskan tembakan ke mahasiswa tak bersenjata, menyebabkan korban jiwa di berbagai universitas (Hushen, 2025). Tindakan kekerasan ini, yang didokumentasikan dan disebarluaskan secara luas melalui media sosial, memicu kemarahan publik dan mengubah protes yang dipimpin mahasiswa menjadi revolusi massa yang akhirnya memaksa Perdana Menteri Sheikh Hasina mengundurkan diri (Ahmed & Kapur, 2025; Hushen, 2025).

Hal ini menandakan pergeseran dalam bentuk organisasi perlawanan sipil. Repertoar kini lebih berjejaring, lebih cepat, dan kurang bergantung pada kepemimpinan terpusat. Meskipun demikian, gerakan tetap mengandalkan kemarahan moral kolektif, pembuatan klaim publik, dan partisipasi massa, sehingga tetap berada dalam ranah

perlawanan sipil yang lebih luas, bukan pemberontakan bersenjata (Ahmed & Kapur, 2025). Analisis ilmiah dari Institut Studi Asia Selatan NUS mencatat bahwa gerakan tersebut “menunjukkan bagaimana gerakan yang terdesentralisasi dan dipimpin pemuda dapat mengubah arah politik nasional” serta bahwa “kemarahan dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina telah lama terakumulasi”, didorong oleh kesulitan ekonomi dan persepsi pertumbuhan yang tidak merata (Ahmed & Kapur, 2025).

Protes Gen Z Nepal pada September 2025 semakin mengilustrasikan pola yang sama. Gerakan yang bermula sebagai tuntutan hak digital setelah pemerintah memberlakukan larangan nasional terhadap platform media sosial dengan cepat berkembang menjadi kerusuhan nasional. Para demonstran menuntut tidak hanya pemulihan kebebasan daring, tetapi juga akuntabilitas pemerintah, pemberantasan korupsi, serta penolakan nepotisme politik (Koirala, 2025; Staff Writer, 2025; Wikipedia, n.d.). Bentrokan dengan pasukan keamanan menyebabkan puluhan korban jiwa dan ratusan luka, pendudukan gedung parlemen, pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli, serta pemberlakuan jam malam nasional yang ditegakkan oleh militer (Koirala, 2025; Staff Writer, 2025; Wikipedia, n.d.). Meskipun larangan media sosial akhirnya dicabut, tuntutan perubahan politik sistemik yang lebih luas masih belum terselesaikan, sehingga Nepal berada dalam fase transisi yang rawan.

Kasus-kasus komparatif ini menunjukkan bahwa meskipun India paling eksplisit menginstitutionalisasi Ahimsa melalui kebijakan pendidikan, kawasan Asia Selatan secara luas memiliki repertoar perlawanan sipil yang menekankan partisipasi massa dan pembuatan klaim public, meskipun bahasa moral Gandhian tidak selalu disebut secara eksplisit. Gerakan di Nepal dan Bangladesh membuktikan bahwa perlawanan sipil yang dipimpin pemuda kini bergerak melalui koordinasi digital sama besarnya dengan repertoar warisan ketidakpatuhan yang disiplin, namun keduanya tetap beroperasi dalam batas normatif perlawanan tanpa senjata.

Paradoks Kewarganegaraan Non-Kekerasan

Temuan terakhir mengungkap paradoks institusional. Kebijakan pendidikan India secara formal merayakan non-kekerasan sebagai bagian dari pembentukan kewarganegaraan. Namun, kajian protes berulang kali menunjukkan bahwa perbedaan pendapat muncul justru dalam konteks ketegangan demokrasi, eksklusivitas, dan ketidakpercayaan. Artinya, negara membantu melestarikan bahasa Ahimsa pada tingkat kurikulum, sementara politik kontestasi terus menguji kredibilitasnya dalam praktik. Hasilnya bukanlah hilangnya Ahimsa, melainkan kontestasinya. Ahimsa bertahan sebagai norma publik, tetapi otoritasnya kini bergantung pada kemampuan institusi untuk menyelaraskan cita-cita kewarganegaraan dengan praktik demokrasi. Ketegangan ini membantu menjelaskan mengapa kewarganegaraan non-kekerasan tetap kuat sebagai klaim moral, meskipun aktivis muda semakin mengandalkan jaringan digital, solidaritas interseksional, dan performa publik yang konfrontatif (Ali, 2024; Behl, 2022; Guru, 2020; Ministry of Education, 2021).

Hubungan ambivalen negara terhadap perbedaan pendapat non-kekerasan menciptakan paradoks sosialisasi yang berpotensi melemahkan legitimasi nilai-nilai warisan di kalangan generasi muda. Sementara wacana resmi merayakan nilai-nilai Gandhian, respons negara terhadap protes damai sering kali melibatkan koersi. Selama protes petani di India, misalnya, “para petani demonstran diserang dengan tongkat bambu dan gas air mata oleh pasukan pemerintah” (Bhattarai, 2025). Demikian pula, protes Gen Z Nepal tahun 2025 semakin memanas setelah “polisi melepaskan tembakan kepada demonstran, menyebabkan sedikitnya 19 orang tewas dan ratusan terluka” (Rastogi, 2025). Di Bangladesh, pemberontakan Juli 2024 menyaksikan pasukan negara membunuh ratusan demonstran, dengan laporan yang menyebutkan bahwa “sebagian besar korban tewas dan luka bukan pemimpin mahasiswa atau kader partai, melainkan buruh harian, pekerja transportasi, pemilik usaha kecil, ibu rumah tangga, anak-anak, dan warga non-elite lainnya” (Sohel & Md Rahatul Mowla Rahat, 2026).

Paradoks ini mungkin berkontribusi pada apa yang diamati para peneliti sebagai “kurangnya kepercayaan kolektif” di kalangan pemuda terhadap institusi politik Asia Selatan (Wikipedia, n.d.). Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa “keyakinan kuat, komitmen, tekad, dan prinsip-prinsip gerakan non-kekerasan” berhasil menjadikan kelompok demonstran disiplin selama kampanye perlawanan sipil yang panjang, meskipun menghadapi koersi pemerintah (Bhattarai, 2025). Efek disiplin ini mencerminkan internalisasi Ahimsa sebagai norma kolektif yang mengatur perilaku protes, bahkan ketika negara sendiri melanggar norma tersebut.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Ahimsa paling jelas bertahan di India kontemporer bukan sebagai sifat pribadi yang tetap, melainkan sebagai wacana terlembagakan mengenai kewarganegaraan non-kekerasan. Kontribusi utama Gandhi adalah mentransformasi Ahimsa menjadi repertoar politik melalui Satyagraha. Institusi pascakolonial, khususnya kebijakan pendidikan dan wacana kurikulum, turut melestarikan repertoar tersebut dengan mengaitkan non-kekerasan dengan kewarganegaraan, penalaran etis, pengabdian masyarakat, dan pendidikan holistik. Gerakan protes kontemporer di India masih memanfaatkan bahasa publik ini, meskipun menyesuaikannya dengan bentuk organisasi, identitas, dan visibilitas publik yang baru.

Bukti dari Bangladesh dan Nepal mengindikasikan bahwa perlawanan sipil di Asia Selatan kini bergerak melalui koordinasi digital sama besarnya dengan repertoar warisan ketidakpatuhan yang disiplin. Pemberontakan Juli 2024 di Bangladesh dan protes Gen Z Nepal pada September 2025 membuktikan bahwa gerakan yang dipimpin pemuda sangat bergantung pada komunikasi berjejaring, meskipun bahasa moralnya tidak secara eksplisit bersifat Gandhian. Implikasi utamanya adalah bahwa Ahimsa tetap relevan secara sosiologis, tetapi sebagai bahasa publik yang diperebutkan. Ketahanan Ahimsa bergantung pada institusi, pedagogi, dan praktik demokrasi, bukan semata-mata pada konsensus moral yang diwariskan.

Penelitian mendatang sebaiknya mengkaji pola komparatif internalisasi Ahimsa di berbagai negara Asia Selatan, peran media digital dalam mentransformasi repertoar non-kekerasan, serta dampak jangka panjang kekerasan negara terhadap daya tahan norma non-kekerasan. Penelitian semacam ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai etika kuno dapat menopang kewarganegaraan demokrasi di tengah perubahan sosial yang cepat.

Referensi

- Ahmed, I., & Kapur, R. (2025). *A Year After Bangladesh 's Uprising : Fragmented Politics and Disunity*. Institute of South Asian Studies (ISAS).
- Ali, S. S. (2024). The veil of resistance in Shaheen Bagh: Muslim women's activism and the differential solidarity networks. *Social Identities*, 30(6), 535–553. <https://doi.org/10.1080/13504630.2024.2415560>
- Behl, N. (2022). India's Farmers' Protest: An Inclusive Vision of Indian Democracy. *American Political Science Review*, 116(3), 1141–1146. <https://doi.org/DOI:10.1017/S0003055422000156>
- Berger, P., & Luckman, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. In *Penguin Books: Vol. 2nd Editio*. <https://doi.org/10.56294/sctconf2023457>
- Bhagwat, N. (2020, December 19). *Indian women revive non-violent civil disobedience movements against the extinguishment of citizenship rights | International Association of Democratic Lawyers*. International Review of Contemporary Law. <https://iadllaw.org/2020/12/indian-women-revive-non-violent-civil-disobedience-movements-against-the-extinguishment-of-citizenship-rights/>
- Bhattarai, P. (2025). *Lessons Learned from Civic Resistance in South Asia - CSC*. Centre for Social Change. <https://socialchange.org.np/peoples-power-blog/lessons-learned/>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Bramsen, I. (2023). *The Micro-Sociology of Peace and Conflict*. In *Cambridge University Press*. Cambridge University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/9781009282710>
- Diop, M. O., Bhushan, S., & Nikalje, V. M. (2020). *Ahmisa (Non-Violence), Gandhi and Global Citizenship Education (GCED)*. Gandhi and Global Citizenship Education (GCED). <https://www.unesco.org/en/articles/ahmisa-non-violence-gandhi-and-global-citizenship-education-gced>
- Gianolla, C. (2025). The postcolonial sociology of love in Gandhi's non-violent political culture of Satyagraha. *Frontiers in Sociology, Volume 10*. <https://www.frontiersin.org/journals/sociology/articles/10.3389/fsoc.2025.1520969>
- Guru, G. (2020). National Education Policy 2020. *Economic and Political Weekly*, 55(31), 5–6. <https://doi.org/10.4324/9781003607380-5>
- Hsieh, Hsiu-Fang, & Shannon, Sarah E. (2005). Three Approaches to Qualitative

- Content Analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>
- Hushen, M. D. (2025). Harnessing Facebook by Gen Z to Mobilize Masses and Transform Student Protest into Revolution: A Study on Quota Reform Movement 2024 in Bangladesh *SSRN Electronic Journal*, 145–168. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5140216>
- Koirala, J. (2025). *Gen Z Protests and Role of Social Media in Nepal (September 8–10, 2025)*. Cambridge Open Engage. <https://doi.org/10.33774/coe-2025-x0j4z>
- Kumari, M. (2026). Value-Based Education and the Indian Knowledge System. *International Journal of Social Impact*, 11(1), 125–129. <https://doi.org/10.25215/2455/1101014>
- Mahajan, P. (2026). Value-Based and Holistic Educational Approaches in the Light of the National Educational Policy 2020. *The Academic*, 4(1), 60–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.18797264>
- Malik, M. A. R., Abbas, R. Z., Ashraf, M., Rehman, C. A., & Ahmad, Z. (2011). Gandhi's Ahimsa- A Critical Review at the Critical Time of War against Terrorism. *International Journal of Business and Social Science*, 2(12), 115–119. <file:///C:/Users/zulad/Downloads/SSRN-id1914272.pdf>
- Ministry of Education. (2021, July 9). *Introducing Indian Values in School Education*. Government of India. <https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1744055®=3&lang=2>
- Neundorf, A., & Smets, K. (2017). Political Socialization and the Making of Citizens. In O. H. E. Board (Ed.), *Oxford University Press*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199935307.013.98>
- Rastogi, P. (2025, December 23). Crises next door: How 2025 shook India's neighbours - The Times of India. *Times of India*. <https://timesofindia.indiatimes.com/world/south-asia/crises-next-door-how-2025-shook-indias-neighbours/articleshow/126155415.cms>
- Sohel, M., & Md Rahatul Mowla Rahat. (2026). The July 2024 Movement in Bangladesh: A Focused Study of the Role and Response of the Common People in Dhaka District. *Journal of South Asian Issues (JSAI)*, 1(1), 200–216. <https://doi.org/10.65826/jsai.1.1.2026.53>
- Staff Writer. (2025, October 17). *The 2025 Gen Z Uprising in Nepal: A Three-Part Analysis | Harvard T.H. Chan School of Public Health*. <https://hsph.harvard.edu/atrocities-prevention-lab/news/the-2025-gen-z-uprising-in-nepal-a-three-part-analysis/>
- Stephan, M. J., Chenoweth, E., Ackerman, P., Bond, D., Caverley, J., Clark, H., Downes, A., Eidelson, R., Fuhrmann, M., Kroenig, M., Lawrence, A., Lyall, J., Mcadam, D., Mendoza, A., Merriman, H., Pearlman, W., Spector, R., Toft, M. D., Walker, N., & Zunes, S. (2008). Why Civil Resistance Works. *International Security*, 33(158), 7–44.

- The National Steering Committee. (2023). National Curriculum Framework for School Education 2023. In *Ministry of Human Resource Development* (Issue 1).
- Tilly, C. (1978). *From Mobilization to Revolution* (First Edit). Random House, New York. <https://voidnetwork.gr/wp-content/uploads/2016/09/From-Mobilization-to-Revolution-by-Charles-Tilly-1.pdf>
- Wikipedia. (n.d.). *Gen Z protests in Asia: Can they spark real change? – DW – 09/18/2025*. https://en.wikipedia.org/wiki/Gen_Z_protests_in_Asia. Retrieved April 22, 2026, from https://en.wikipedia.org/wiki/Gen_Z_protests_in_Asia